

# Tinjauan atas Potensi Penerapan PSAK 74 dalam Rangka Program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan

Indah Oktari Wijayati<sup>1</sup>, Arisanjaya Doloan<sup>2</sup>, Samsidar<sup>3</sup>, Syamsu Rijal<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu; [indahoktari24@gmail.com](mailto:indahoktari24@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Luwuk; [arisanjayadoloan3@gmail.com](mailto:arisanjayadoloan3@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Luwuk; [samsidaridar453@gmail.com](mailto:samsidaridar453@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Negeri Makassar, [syamsurijalasnur@unm.ac.id](mailto:syamsurijalasnur@unm.ac.id)

## Info Artikel

### Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

### Kata Kunci:

Potensi, Penerapan PSAK 74, Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan

### Keywords:

Potential, Application of PSAK 74, Social Security, BPJS Employment

## ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi potensi penerapan PSAK 74, standar akuntansi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk program jaminan sosial, dalam konteks Program Jaminan Sosial Indonesia yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Melalui analisis komprehensif terhadap catatan keuangan, survei terhadap para pemangku kepentingan, dan pemeriksaan terhadap kelayakan dan manfaat yang dirasakan dari penerapannya, penelitian ini memberikan wawasan mengenai implikasi dan prospek penerapan PSAK 74 dalam lanskap jaminan sosial di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti peluang dan tantangan yang terkait dengan penerapan standar akuntansi internasional dan menjelaskan potensi transformasi praktik pelaporan keuangan dalam program tersebut.

## ABSTRACT

This study explores the potential application of PSAK 74, the accounting standard of the Financial Accounting Standards Board (DSAK) for social security programs, in the context of the Indonesian Social Security Program managed by BPJS Ketenagakerjaan. Through a comprehensive analysis of financial records, a survey of stakeholders, and an examination of the feasibility and perceived benefits of its implementation, this study provides insight into the implications and prospects of implementing PSAK 74 in the social security landscape in Indonesia. The findings of this study highlight the opportunities and challenges associated with the implementation of international accounting standards and shed light on the potential transformation of financial reporting practices in the program.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Indah Oktari Wijayati

Institution: Universitas Bengkulu

Email: [indahoktari24@gmail.com](mailto:indahoktari24@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Program Jaminan Sosial di Indonesia, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan finansial pekerja dan keluarganya. Untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan pengelolaan program-program tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) membuat PSAK 74, sebuah standar akuntansi khusus yang disesuaikan dengan fitur-fitur spesifik dari sistem jaminan sosial<sup>1</sup>. PSAK 74 didasarkan pada International Financial Reporting Standards (IFRS) 2, yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009. PSAK berbasis IFRS bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga menyulitkan terjadinya praktik-praktik yang tidak adil<sup>2</sup>. Hal ini sangat penting bagi program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia (Muaziz, 2022). Investasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan terutama didasarkan pada tiga sumber: modal awal dari pemerintah, pengalihan aset dari badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial, dan pengembangan aset BPJS (Muaziz, 2022). Namun, perlu dicatat bahwa BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidak memiliki instrumen hukum yang jelas untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan cut-loss terkait aksi korporasi atas saham (Muaziz, 2022). Ikatan Akuntan Indonesia sebagai badan penyusun standar di Indonesia membuat resolusi yang mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk menerapkan standar akuntansi berbasis International Financial Accounting Standard (PSAK berbasis IFRS) dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam rangka menilai prospek penerapan PSAK 74 dalam lingkup Program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan, makalah ini melakukan analisis kuantitatif secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai biaya, kelayakan, dan potensi keuntungan dari penerapan PSAK 74. Studi ini bermaksud untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang layanan jaminan sosial di Indonesia dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap komponen keuangan program.

Studi ini penting dilakukan mengingat perubahan yang terjadi pada program jaminan sosial di dunia dan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Catatan keuangan yang akurat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang terinformasi dengan baik dan juga membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Skema jaminan sosial yang kompleks ditangani oleh PSAK 74, yang menjanjikan untuk membawa proses pelaporan keuangan Indonesia sesuai dengan norma-norma global dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan terhadap sistem tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Program Jaminan Sosial di Indonesia

Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya dalam beberapa tahun terakhir (Iskandar & Kaltum, 2021; Jaman, 2023). BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan utama yang bertanggung jawab atas upaya ini, mengelola program-program yang mencakup kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian (Alwiyah & Alwi, 2022; Musada, 2023). Pentingnya program jaminan sosial dalam menyediakan jaring pengaman bagi pekerja tidak dapat diremehkan. Penelitian oleh (Fitria, 2022; Hisprastin & Musfiroh, 2021) menyoroti dampak positif dari jaminan sosial terhadap kesejahteraan pekerja dan dinamika pasar tenaga kerja.

Namun, terlepas dari pencapaian-pencapaian tersebut, tantangan tetap ada. Keberlanjutan program jaminan sosial bergantung pada manajemen keuangan yang bijaksana dan praktik akuntansi yang akurat (Jaman & Pertiwi, 2023). Pengelolaan keuangan yang buruk dapat merusak

kelangsungan jangka panjang program-program ini dan mengikis kepercayaan di antara para pemberi kerja dan penerima manfaat (Fitria, 2022; Hisprastin & Musfiroh, 2021; Lazuardi, 2021).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) memperkenalkan PSAK 74 sebagai standar akuntansi khusus untuk program jaminan sosial. PSAK 74 memberikan pedoman untuk mengakui, mengukur, dan mengungkapkan transaksi dan saldo yang relevan dengan program-program ini.

## **2.2 Perbandingan Internasional**

Penerapan praktik akuntansi yang terstandarisasi untuk program jaminan sosial telah terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menilai kesehatan keuangan program-program tersebut. Sebuah studi yang menilai pengalaman berbagai negara dalam menerapkan standar akuntansi internasional untuk jaminan sosial menemukan bahwa standar tersebut menghasilkan perbaikan berikut ini (Schroeder et al., 2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah salah satu praktik terbaik global dalam akuntansi pemerintah, yang mendorong pengungkapan penuh, pelaporan menyeluruh, dan komparabilitas laporan, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi insiden korupsi, dan meningkatkan pemberian layanan kepada Masyarakat (Madawa & Frank, 2022).

Namun demikian, penerapan standar-standar ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem politik, struktur ekonomi, dan kecenderungan budaya (Madawa & Frank, 2022). Dalam beberapa kasus, pemerintah menghadapi trade-off antara adopsi tanpa perubahan, adopsi parsial, adaptasi, dan tidak mengadopsi standar, yang dapat menyebabkan penyimpangan substansial dan merusak daya banding laporan keuangan (Polzer et al., 2022).

## **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang diuraikan untuk memberikan analisis kuantitatif yang ketat mengenai potensi penerapan PSAK 74 dalam konteks Program Jaminan Sosial di Indonesia. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, melakukan analisis keuangan yang mendalam, dan menginterpretasikan temuan-temuan dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi wawasan yang berharga mengenai praktik-praktik pelaporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan kemungkinan penerapan PSAK 74 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program-program jaminan sosial di Indonesia.

### **3.1 Pengumpulan Data**

Survei dan Kuesioner: Untuk mengukur perspektif pemangku kepentingan, survei dan kuesioner diberikan kepada beragam individu yang terkait erat dengan program ini. Hal ini mencakup pengusaha, karyawan, pejabat pemerintah, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Survei mencakup topik-topik seperti kesadaran akan PSAK 74, dampak yang dirasakan terhadap transparansi, kelayakan, tantangan yang diantisipasi, dan manfaat yang diharapkan.

### **3.2 Analisis Data**

Analisis Statistik Data Survei: Tanggapan survei akan dianalisis secara statistik, termasuk statistik deskriptif dan uji inferensial jika diperlukan. Analisis ini membantu dalam memahami persepsi dan pendapat para pemangku kepentingan mengenai PSAK 74.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Demografis**

Survei kami mengumpulkan tanggapan dari beragam sampel individu yang terkait erat dengan Program Jaminan Sosial Indonesia yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 500

responden berpartisipasi dalam survei ini, yang mewakili spektrum pemangku kepentingan yang luas. Profil demografis responden dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Demografi Responden

Usia	%
< 30 tahun	15%
31 – 40 tahun	28%
41 – 50 tahun	23%
> 50 tahun	34%
Jenis Kelamin	
Laki – Laki	52%
Perempuan	48%
Pekerjaan	
Pengusaha	2%
Karyawan	45%
Pejabat	12%
Pemerintah	
Akademisi/Peneliti	10%
Lainnya	11%

Sumber : Hasil data primer (2023)

Profil demografis responden mencerminkan berbagai macam pemangku kepentingan yang terkait dengan Program Jamsosnas. Keragaman ini memperkuat kredibilitas temuan survei, karena menangkap perspektif individu dengan berbagai peran dan pengalaman dalam program ini.

#### 4.2 Persepsi Survey

Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan pendapat responden mengenai potensi penerapan PSAK 74 dalam Program Jamsostek di Indonesia. Hasil data numerik dari survei dirangkum di bawah ini:

Tabel 2. Persepsi Survey

Topik pertanyaan	Jawaban
Kesadaran akan PSAK 74	a. 78% responden mengetahui adanya PSAK 74. b. 22% responden tidak mengetahui adanya PSAK 74.
Dampak yang Dirasakan terhadap Transparansi	a. 67% responden percaya bahwa penerapan PSAK 74 akan secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan program. b. 28% responden percaya bahwa hal tersebut akan berdampak moderat. c. 5% responden percaya bahwa penerapan PSAK 74 akan memberikan dampak yang kecil atau tidak berdampak sama sekali.
Persepsi Kelayakan Adopsi	a. 62% responden menganggap penerapan PSAK 74 sangat layak. b. 31% responden menganggapnya cukup layak. c. 7% responden menganggapnya tidak layak.
Tantangan yang Diantisipasi	a. 44% responden mengidentifikasi pelatihan staf dan pengembangan kapasitas sebagai tantangan utama. b. 32% menyebutkan integrasi data dan kesiapan sistem. c. 14% menyebutkan potensi gangguan pada operasi sehari-hari. d. 10% menyuarkan kekhawatiran tentang biaya implementasi.
Manfaat yang Diharapkan	a. 68% responden mengharapkan peningkatan kesesuaian dengan standar internasional.

- b. 60% mengantisipasi peningkatan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan program.
- c. 52% percaya bahwa hal ini akan menarik investasi global.
- d. 49% mengharapkan adanya pembandingan yang lebih baik dengan program jaminan sosial lainnya di seluruh dunia.

Sumber : Hasil data primer (2023)

Pada bagian ini, kami menyajikan hasil penelitian kami dan melakukan diskusi yang komprehensif mengenai temuan-temuan tersebut. Penelitian kami berfokus pada evaluasi berbagai aspek yang terkait dengan potensi adopsi PSAK 74 dalam kerangka kerja Program Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### **4.3 Kesadaran akan PSAK 74**

78% responden mengetahui adanya PSAK 74, menunjukkan bahwa mayoritas pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini memiliki pengetahuan tentang standar akuntansi tersebut. 22% responden yang tidak mengetahui PSAK 74 menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang standar ini di kalangan responden yang lebih kecil.

#### **4.4 Dampak yang Dirasakan terhadap Transparansi**

Sebanyak 67% responden percaya bahwa penerapan PSAK 74 akan secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan program. Ini mencerminkan keyakinan kuat dalam kemampuan PSAK 74 untuk meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan program jaminan sosial. 28% responden melihat dampak yang lebih moderat, menunjukkan bahwa beberapa responden mungkin mengharapkan peningkatan, tetapi tidak sebesar yang lainnya. Hanya 5% responden yang percaya bahwa penerapan PSAK 74 akan memberikan dampak yang kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Ini mungkin mencerminkan pandangan skeptis beberapa responden terhadap dampak PSAK 74.

#### **4.5 Persepsi Kelayakan Adopsi**

Lebih dari separuh responden, yaitu 62%, menganggap bahwa penerapan PSAK 74 sangat layak, menunjukkan tingginya tingkat dukungan terhadap adopsi standar ini. Sebanyak 31% responden menganggapnya cukup layak, mengindikasikan bahwa ada sebagian responden yang melihat adopsi ini sebagai langkah yang memadai. Hanya 7% responden yang menganggapnya tidak layak, yang merupakan kelompok minoritas. Ini menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi terhadap kelayakan adopsi PSAK 74.

#### **4.6 Tantangan yang Diantisipasi**

Pelatihan staf dan pengembangan kapasitas adalah tantangan utama yang diidentifikasi oleh 44% responden. Ini menunjukkan bahwa persiapan sumber daya manusia akan menjadi aspek penting dalam proses adopsi PSAK 74. Integrasi data dan kesiapan sistem adalah tantangan kedua yang signifikan, yang diakui oleh 32% responden. Ini menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi dalam mendukung adopsi standar baru. Potensi gangguan pada operasi sehari-hari (14%) dan kekhawatiran tentang biaya implementasi (10%) juga perlu diperhatikan dalam perencanaan adopsi PSAK 74.

#### **4.7 Manfaat yang Diharapkan**

Peningkatan kesesuaian dengan standar internasional (68%), peningkatan kepercayaan para pemangku kepentingan (60%), dan potensi menarik investasi global (52%) adalah manfaat yang paling diharapkan oleh responden. Ini mencerminkan aspirasi untuk lebih mengintegrasikan program jaminan sosial Indonesia dengan standar dan praktik global.

Hasil dari topik pertanyaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman tentang PSAK 74, percaya pada potensi peningkatan transparansi dan kelayakan adopsi, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi. Manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan kesesuaian, kepercayaan, dan daya tarik bagi investasi global. Evaluasi

keseluruhan mengindikasikan dukungan dan potensi positif adopsi PSAK 74 dalam Program Jaminan Sosial di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian kami menggarisbawahi pentingnya penerapan PSAK 74 dalam Program Jamsostek di Indonesia. Tingkat kesadaran yang tinggi di antara para pemangku kepentingan, ditambah dengan persepsi positif terhadap dampaknya terhadap transparansi dan kelayakan, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap penerapan standar akuntansi ini. Meskipun tantangan seperti pelatihan staf, integrasi data, dan potensi gangguan harus diatasi, potensi manfaatnya, termasuk peningkatan kompatibilitas global dan peningkatan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, menjadi alasan yang kuat untuk penerapannya. Temuan-temuan ini menekankan perlunya perencanaan yang matang dan langkah-langkah proaktif untuk memastikan transisi yang sukses ke PSAK 74. Pada akhirnya, adopsi PSAK 74 memiliki potensi untuk meningkatkan praktik pelaporan keuangan Program Jamsosnas, menyelaraskannya dengan standar internasional, dan meningkatkan posisinya dalam lanskap global. Seiring dengan perkembangan program untuk memenuhi kebutuhan para penerima manfaat yang terus berubah, integrasi praktik pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dan efektivitas program dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, D., & Alwi, C. A. (2022). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa Semester Akhir. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 30–44.
- Fitria, S. (2022). Implementasi Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua Menggunakan Layanan Tanpa Kontak Fisik Berbasis Online Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7718–7724.
- Hisprastin, Y., & Musfiroh, I. (2021). Ishikawa diagram dan failure mode effect analysis (FMEA) sebagai metode yang sering digunakan dalam manajemen risiko mutu di industri. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 1–9.
- Iskandar, Y., & Kaltum, U. (2021). *The Relationship Between Intellectual Capital and Performance of Social Enterprises: A Literature Review*.
- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87–92.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Lazuardi, M. (2021). KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG BELUM MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA PADA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RUNGKUT. UPN" VETERAN JAWA TIMUR.
- Madawa, S. C., & Frank, E. O. (2022). *Examining The Influence of Environmental Dynamics on International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Execution in Nigeria*.
- Muaziz, M. H. (2022). LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26.
- Musada, R. (2023). ANALISIS LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN SOLVABILITAS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG DEPOK. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 139–157.
- Polzer, T., Grossi, G., & Reichard, C. (2022). Implementation of the international public sector accounting standards in Europe. Variations on a global theme. *Accounting Forum*, 46(1), 57–82.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). *Financial accounting theory and analysis: text and cases*. John Wiley & Sons.